



---

## Knowledge Dissemination dalam Kebijakan Open Data Pemerintah (Studi Efektivitas Portal *data.go.id* sebagai Media Transparansi Birokrasi)

Athayandra Caytano<sup>1</sup>, Dewinta Oktavia<sup>2</sup>, Izzati kamila Pahsya<sup>3</sup>, Fatkhuri<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [2410413138@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413138@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410413023@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413023@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410413050@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413050@mahasiswa.upnvj.ac.id), [fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

---

### ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the *data.go.id* portal as a medium of public transparency through the process of knowledge dissemination in the context of open government data. The main issue addressed in this study is the gap between the availability of data provided by the government and the public's ability to understand and utilize it. Although data has been made widely accessible, not all information can be easily accessed and transformed into meaningful knowledge. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, literature review, and document study. The analytical framework refers to the Knowledge Management theory developed by Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, particularly the SECI model, which explains the process of transforming data into knowledge. The findings indicate that the effectiveness of the *data.go.id* portal remains suboptimal. This is caused by unstandardized data quality, the lack of regular dataset updates, and data presentation that is still difficult for the general public to understand. In addition, low levels of public data literacy and the limited availability of supporting features such as data visualization and contextual explanations further hinder its effectiveness.

**Keywords:** Open Government Data, Knowledge Dissemination, Public Transparency

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas portal *data.go.id* sebagai media transparansi publik melalui proses knowledge dissemination dalam konteks open government data. Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan data yang disediakan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta memanfaatkannya. Meskipun data telah dibuka secara luas, tidak semua informasi dapat dengan mudah diakses dan diolah menjadi pengetahuan yang bermakna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, dan studi dokumen. Kerangka analisis mengacu pada teori Knowledge Management dari Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi yang menjelaskan proses transformasi data menjadi pengetahuan melalui model SECI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas portal *data.go.id* masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kualitas data yang belum terstandarisasi, kurangnya pembaruan dataset, serta penyajian data yang masih sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, rendahnya literasi data masyarakat dan minimnya fitur pendukung seperti visualisasi dan penjelasan kontekstual turut menghambat.

**Kata Kunci:** Open Government Data, Diseminasi Pengetahuan, Transparansi Publik

## PENDAHULUAN

Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan melalui konsep *e-government* menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu bentuk implementasinya adalah *open government data*, yaitu kebijakan pemerintah dalam menyediakan data secara terbuka agar dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Menurut World Bank (2002), pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan memungkinkan peningkatan akses informasi publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, keterbukaan data tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui portal data terbuka seperti [data.go.id](http://data.go.id) yang menyediakan berbagai dataset dari instansi pemerintah. Kehadiran portal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi informasi publik. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa ketersediaan data belum tentu diiringi dengan pemanfaatan yang optimal oleh masyarakat. Banyak dataset yang tersedia masih sulit dipahami, kurang terbaru, serta tidak disajikan dalam format yang ramah pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan data belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *open data* memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Penelitian oleh Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012) menemukan bahwa *open government data* dapat mendorong inovasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data serta kemudahan aksesnya. Sementara itu, penelitian Zuiderwijk dan Janssen (2014) menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan data terbuka adalah rendahnya literasi data serta kurangnya kemampuan pengguna dalam mengolah informasi yang tersedia. Di Indonesia, beberapa studi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan portal data terbuka masih terbatas karena kurangnya sosialisasi, kompleksitas data, serta minimnya upaya pemerintah dalam menyederhanakan informasi bagi masyarakat umum.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ketersediaan data, kualitas teknis, atau kebijakan *open data*, dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana proses *knowledge dissemination* berlangsung dalam konteks data terbuka. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana data yang tersedia dapat benar-benar dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi yang substantif. Padahal, dalam perspektif ilmu politik, transparansi tidak hanya diukur dari keterbukaan informasi, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh publik dalam mengawasi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusulkan untuk menganalisis efektivitas portal [data.go.id](http://data.go.id) dalam proses *knowledge dissemination*, yaitu bagaimana data terbuka dapat diubah menjadi pengetahuan yang bermakna bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan

kajian *e-government* dan demokrasi digital, khususnya dalam memahami bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan membuka data, tetapi juga memerlukan strategi penyebaran pengetahuan yang efektif agar data tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis efektivitas portal data.go.id sebagai media transparansi dan knowledge dissemination. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana data pemerintah disajikan, diakses, dan dimanfaatkan oleh publik dalam konteks open data. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, proses, dan konteks penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada penggambaran fenomena secara kontekstual dan interpretatif, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi keterbukaan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap portal data.go.id untuk menilai ketersediaan dataset, kemudahan akses, serta fitur yang mendukung penyebaran informasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur ilmiah terkait open government data, transparansi, dan diseminasi pengetahuan. Penelusuran ini penting untuk memahami kerangka konseptual dan temuan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas open data. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

Selanjutnya, penelitian juga memanfaatkan studi dokumentasi, yaitu dengan menganalisis dokumen resmi seperti kebijakan Satu Data Indonesia, laporan pemerintah, serta data yang tersedia di portal data.go.id. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang bersumber dari portal dan dokumen publik tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola, kelebihan, dan kendala dalam pemanfaatan portal sebagai media transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan open data tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatannya oleh publik (Attard et al., 2015). Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga peneliti dapat memahami fenomena penelitian secara lebih mendalam dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Ketersediaan dan Aksesibilitas Data pada Portal data.go.id*

Hasil observasi menunjukkan bahwa portal data.go.id telah menyediakan berbagai dataset dari banyak instansi pemerintah, seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga pembangunan daerah. Keberadaan portal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam

---

menerapkan prinsip open government data sebagai bagian dari pengembangan e-government di Indonesia. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai informasi publik yang sebelumnya sulit dijangkau secara terbuka.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan data belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses dan pemanfaatan informasi. Sebagian besar dataset masih disajikan dalam bentuk data mentah seperti spreadsheet, tabel statistik, maupun file unduhan tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat umum kesulitan memahami isi data, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki kemampuan analisis data atau latar belakang statistik.

Selain itu, beberapa dataset juga ditemukan belum diperbarui secara berkala sehingga informasi yang tersedia menjadi kurang relevan dengan kondisi terkini. Dalam konteks transparansi publik, pembaruan data merupakan aspek penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan aktual untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan open government data sangat bergantung pada kualitas data, konsistensi pembaruan, serta kemudahan akses bagi pengguna.

Dari hasil observasi, ditemukan pula bahwa sistem pencarian dan kategorisasi data pada portal masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa dataset sulit ditemukan karena penggunaan istilah teknis antarinstansi yang berbeda-beda. Akibatnya, pengguna harus melakukan pencarian secara berulang untuk menemukan data yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa portal data.go.id masih lebih berorientasi pada penyediaan data dibandingkan pada pengalaman pengguna (user experience).

Implementasi open government data melalui portal data.go.id juga menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam era digital. Sebelumnya, informasi publik cenderung bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Namun, melalui digitalisasi data pemerintah, masyarakat kini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi secara langsung tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan e-government dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan modern.

Meskipun demikian, keterbukaan informasi digital tidak selalu menjamin meningkatnya partisipasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang portal data.go.id sebagai platform yang kompleks dan sulit digunakan. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan portal masih cenderung terbatas pada akademisi, peneliti, jurnalis, atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan teknis dalam membaca data. Menurut Dawes (2010), transparansi berbasis informasi tidak hanya membutuhkan keterbukaan akses, tetapi juga membutuhkan kemudahan pemahaman agar data dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat.

### *Efektivitas Knowledge Dissemination dalam Portal data.go.id*

Dalam perspektif teori Knowledge Management dari Nonaka dan Takeuchi (1995), data yang tersedia pada portal data.go.id dapat dikategorikan sebagai explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang telah terdokumentasi dalam bentuk data dan informasi digital. Namun, agar data tersebut menjadi pengetahuan yang bermakna, diperlukan proses knowledge dissemination yang efektif sehingga informasi dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge dissemination pada portal data.go.id masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya fitur yang membantu masyarakat memahami isi data, seperti visualisasi interaktif, grafik sederhana, infografis, maupun ringkasan interpretatif. Sebagian besar data hanya disajikan dalam format teknis tanpa narasi atau konteks yang menjelaskan makna dari informasi tersebut.

Padahal, dalam proses penyebaran pengetahuan, penyajian informasi yang sederhana dan komunikatif menjadi faktor penting agar data dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Ketika data hanya tersedia dalam bentuk mentah, maka informasi tersebut cenderung hanya dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, atau pihak yang memiliki kemampuan teknis tertentu. Sementara itu, masyarakat umum tetap mengalami kesulitan dalam memahami isi data.

Temuan ini mendukung penelitian Zuiderwijk dan Janssen (2014) yang menjelaskan bahwa rendahnya efektivitas open data sering kali disebabkan oleh kompleksitas dataset serta minimnya mekanisme penyederhanaan informasi. Dengan demikian, keterbukaan data belum secara otomatis menghasilkan keterbukaan pengetahuan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antara pemerintah dan pengguna portal masih relatif terbatas. Portal data.go.id lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan data daripada sebagai ruang komunikasi publik. Belum tersedia fitur yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara aktif terhadap kualitas data atau kebutuhan informasi tertentu. Padahal, dalam konsep knowledge dissemination, proses penyebaran pengetahuan idealnya berlangsung secara dua arah agar terjadi pertukaran informasi antara penyedia data dan pengguna.

Dalam perspektif demokrasi digital, keterbukaan data memiliki hubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Data yang dapat diakses publik memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan maupun penggunaan anggaran negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Meijer, Curtin, dan Hillebrandt (2012) yang menyatakan bahwa transparansi digital dapat memperkuat hubungan antara negara dan warga negara melalui peningkatan akses informasi publik.

Selain itu, efektivitas portal data.go.id juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun budaya data (data culture) di lingkungan birokrasi. Menurut OECD (2019), implementasi open government data membutuhkan komitmen institusional yang kuat, termasuk koordinasi antarinstansi, standarisasi data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data publik.

---

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan data tanpa disertai edukasi publik dapat menciptakan kesenjangan informasi. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi digital tinggi akan lebih mudah memanfaatkan data dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan ketimpangan akses pengetahuan dalam ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi data menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan open government data.

### ***Data Governance dan Konsistensi Pengelolaan Data***

Efektivitas portal data.go.id juga dipengaruhi oleh aspek data governance atau tata kelola data. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat perbedaan standar pengelolaan data antar instansi pemerintah. Beberapa instansi telah menyediakan data yang lengkap dan terstruktur, sementara instansi lainnya masih memiliki dataset yang terbatas dan tidak diperbarui secara berkala.

Ketidakkonsistenan tersebut menyebabkan kualitas data menjadi tidak merata. Dalam beberapa kasus, ditemukan dataset dengan format yang berbeda meskipun membahas topik yang serupa. Hal ini menyulitkan pengguna dalam membandingkan atau mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber data pemerintah.

OECD (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi open government data sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data, termasuk konsistensi format, integrasi informasi, keamanan data, dan pembaruan berkala. Oleh karena itu, lemahnya koordinasi antarinstansi dapat menghambat efektivitas portal sebagai media transparansi publik.

Selain itu, belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia juga menjadi faktor penghambat dalam integrasi data nasional. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan menciptakan standar data yang terintegrasi, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan mekanisme pengelolaan data antar lembaga pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan masih menghadapi tantangan birokrasi dan koordinasi kelembagaan.

Selain itu, tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan kualitas data antarinstansi pemerintah. Beberapa instansi telah menyediakan dataset secara lengkap dan rutin diperbarui, sedangkan instansi lainnya masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data digital. Perbedaan kapasitas kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi open government data di Indonesia masih belum berjalan secara merata. Menurut Ubaldi (2013), keberhasilan open data sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan data secara konsisten.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa dataset pada portal data.go.id masih belum memiliki penjelasan metadata yang lengkap. Padahal, metadata memiliki fungsi penting untuk membantu pengguna memahami sumber data, waktu pembaruan, metode pengumpulan data, serta konteks penggunaannya. Menurut Attard et al. (2015), kualitas metadata merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi open government data karena membantu meningkatkan usability dan interoperabilitas data.

### *Transparansi Publik dan Literasi Data Masyarakat*

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya literasi data masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan portal data.go.id. Sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan data statistik yang tersedia. Akibatnya, meskipun data telah dibuka secara publik, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam proses pengawasan pemerintah maupun partisipasi kebijakan publik.

Dalam konteks demokrasi digital, transparansi tidak hanya berarti membuka akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami secara substantif. Transparansi yang hanya berorientasi pada keterbukaan teknis tanpa mempertimbangkan pemahaman publik berpotensi menghasilkan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sivarajah et al. (2016), usability atau kemudahan penggunaan data menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas open data. Data yang sulit dipahami akan membatasi partisipasi masyarakat dan hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan teknis. Dengan demikian, keterbukaan data belum tentu menghasilkan transparansi yang inklusif.

Untuk meningkatkan efektivitas knowledge dissemination, pemerintah perlu mengembangkan strategi penyederhanaan informasi melalui visualisasi data, penyediaan ringkasan interpretatif, dan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk membantu menerjemahkan data publik menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan portal data.go.id masih memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat (citizen-centered approach). Selama ini, pengelolaan portal cenderung berfokus pada aspek teknis penyediaan data, sementara kebutuhan pengguna umum belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Akibatnya, banyak data yang sebenarnya terbuka tetapi belum mampu diakses secara substantif oleh masyarakat luas.

Dalam konsep digital governance, pelayanan publik berbasis digital seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan pengguna. Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014) menjelaskan bahwa inovasi digital dalam sektor publik perlu menempatkan masyarakat sebagai pusat pengembangan layanan agar teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas antarmuka portal data.go.id agar lebih sederhana dan mudah digunakan. Penyediaan fitur visualisasi interaktif, dashboard informasi, pencarian data yang lebih efektif, serta ringkasan data berbasis infografis dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan open data agar masyarakat lebih aktif menggunakan portal sebagai sarana pengawasan publik.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi open government data melalui portal data.go.id merupakan langkah

---

penting pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik di era digital. Namun, efektivitasnya sebagai media transparansi masih belum optimal karena keterbukaan data belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkannya. Dalam perspektif teori Knowledge Management dari Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, data yang tersedia masih berada pada tahap explicit knowledge yang belum sepenuhnya berhasil ditransformasikan menjadi pengetahuan yang bermakna. Proses knowledge dissemination sebagai jembatan antara data dan pemahaman publik belum berjalan secara efektif, terutama karena kendala pada kualitas data, penyajian informasi, serta rendahnya literasi data masyarakat.

Selain itu, dari sisi data governance, masih terdapat permasalahan seperti ketidakkonsistenan standar data, kurangnya pembaruan dataset, serta minimnya fitur pendukung seperti visualisasi dan penjelasan kontekstual. Hal ini menyebabkan data yang tersedia cenderung sulit diakses secara substantif oleh masyarakat umum, sehingga potensi open data dalam meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, transparansi dalam konteks e-government tidak cukup hanya diwujudkan melalui keterbukaan data, tetapi harus diikuti dengan strategi penyebaran pengetahuan yang efektif. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan penyajian data, memperkuat tata kelola data, serta mendorong literasi data masyarakat agar portal data terbuka benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana transparansi yang substantif dan partisipatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). *A Systematic Review of Open Government Data Initiatives*.
- Dawes, S. S. (2010). Stewardship and usefulness: Policy principles for information-based transparency. *Government Information Quarterly*, 27(4), 377–383.
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector. *Government Information Quarterly*, 31, I–VIII.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). *Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2012.716740>
- Jetzek, T., Avital, M., & Bjørn-Andersen, N. (2014). *Data-driven innovation through open government data*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-016-9679-1>
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- OECD. (2019). *Open government data report: Enhancing policy maturity for sustainable impact*. OECD Publishing.
- Sivarajah, U., Weerakkody, V., Waller, P., Lee, H., & Irani, Z. (2016). *Open data and its usability: An empirical view from the citizen's perspective*.

[https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-18762014000200008&script=sci\\_arttext&tlng=pt](https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-18762014000200008&script=sci_arttext&tlng=pt)

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Ubaldi, B. (2013). Open government data: Towards empirical analysis of open government data initiatives. *OECD Working Papers on Public Governance*, No. 22.

World Bank. (2002). *E-government handbook for developing countries*.

Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1), 17-29.